

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN SECARA DARING BAGI PELAJAR SD DAN SMP DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

M. YUSRIL HASANUDIN

NPP. 29.1681

*Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.1681@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Ternate City, North Maluku Province, aims to determine the implementation of online learning policies for students in Ternate City, North Maluku Province during the Covid-19 pandemic. **Method:** Researchers used interview, observation and documentation techniques **Purpose:** The results of this study indicate that the implementation of policies by the government in implementing online learning policies for students in the city of Ternate, Maluku province. **Result:** The implementation of online learning policies in the city of Ternate is hampered due to several factors, namely internet network disruption, the quality of human resources is still low in terms of understanding technology and the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of online learning for students in Ternate City, North Maluku Province. **Conclusion:** To overcome barriers to learning and optimize the successful implementation of online learning for students in the city of Ternate, the city government of Ternate through the education office

Keywords: *Implementation, Online Learning, Students*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilaksanakan di kota ternate provinsi maluku utara yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di kota ternate provinsi maluku utara selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan snowball sampling. **Metode:** Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data selama proses penelitian berlangsung. **Tujuan:** Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data kemudian menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di kota ternate provinsi Maluku Utara. **Kesimpulan:** Untuk mengatasi terhambatnya pembelajaran serta mengoptimalkan keberhasilan implementasi pembelajaran secara daring bagi pelajar di kota ternate maka pemerintah kota ternate melalui dinas pendidikan kota ternate menerapkan pemberian kuota gratis, memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu guru melalui sosialisasi dan pelatihan/diklat.

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran Secara Daring, Pelajar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan pada dunia dan membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, sejak kasus pertama diumumkan pada maret 2020, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 1,3 juta orang¹, upaya pengendalian penyebaran virus COVID-19 telah menghambat segala aktivitas masyarakat, yang berdampak pada menurunnya aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan, salah satunya di bidang pendidikan, mulai dari PAUD, sampai pendidikan tinggi. Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), dalam surat edaran tersebut dijelaskan, bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh (*online*).

Dalam pembelajaran daring selain untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dalam kenaikan kelas maupun kelulusann, belajar secara daring juga dapat difokuskan pada kecakapan hidup dalam menghadapi pandemi Covid-19, aktivitas pembelajaran juga dapat bervariasi yang antar siswa berbeda-beda, sesuai dengan minat, bakat dan kondisi masing-masing. Akan tetapi dalam pembelajaran secara daring atau online ada banyak hambatan yang dialami oleh siswa dan guru antara lain tidak semua siswa mempunyai perangkat komunikasi berupa laptop maupun handphone, akses internet yang sering mengalami gangguan, tidak semua siswa mampu membeli kuota internet, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran.

Kemudian hal ini bukan hanya dialami oleh siswa tetapi guru juga mengalami kesulitan pembelajaran daring, antara lain kurangnya pemahaman guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran daring, guru juga mengalami kesulitan dalam membuat materi pembelajaran secara daring, para guru juga mengalami kesulitan dalam mengawasi dan membimbing para murid secara langsung².

Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, sekolah memiliki keleluasaan dan tanggung jawab untuk memilih kurikulum belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa selama masa pandemi COVID-19.

Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran saat ini, pemerintah menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran di wilayah kuning dan hijau, serta melarang pembelajaran tatap muka di wilayah merah, dan harus melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR). Berdasarkan data yang didapat per 23 Agustus 2020 dari <https://covid19.go.id>³ terhitung sekitar 48 persen siswa masih berada di wilayah

merah dan oranye. Dan, sekitar 52 persen siswa yang ada pada wilayah kuning dan hijau.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dibalik pelaksanaan kebijakan yang diambil pemerintah, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pendidikan dalam kebijakan Pembelajaran Daring di Kota Ternate. Secara spesifik kepada guru dan pelajar. Hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas dan kebijakan pemerintah yang terbaik untuk menangani permasalahan yang dialami tenaga pendidik dan peserta didik. Selanjutnya adalah permasalahan Sumberdaya manusia yaitu guru yang harus ditingkatkan dalam hal pemahaman teknologi.

Impelemntasi kebijakan daring melalui berbagai surat edaran dari pemerintah yaitu Surat Pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Ternate No: 421/331/2021 tahun 2021. Dalam surat tersebut ditetapkan baha pembelajaran dilaksanakan secara DARING (Dalam Jaringan) dan LURING (Luar Jaringan). Kebijakan tersebut mengatur tentang pelarangan beberapa kegiatan di sekolah seperti Pengenalan Lingkungan Sekolah yang kemudian apabila dilanggar akan diberi sanksi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Wahyu aji Fatma Dewi, dalam bentuk Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 1 April Tahun 2020 dengan judul penelitian “Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar” Kesimpulan pada penelitian ini dijelaskan, pengaruh COVID-19 pada hasil kebijakan dari pendidikan jarak jauh atau daring pada sekolah dasar relatif baik bisa tercapai, implementasi pembelajaran daring pada sekolah dasar bisa terealisasi dengan relatif baik jika terdapat kerjasama dari guru, murid & orang tua pada pembelajaran dari rumah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ialah lokasi penelitian, judul penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan.

Berikutnya yaitu, penelitian dari Ria Yunitasari, Umi Hanifah, dalam bentuk Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020 yaitu tentang “Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID-19” Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, pembelajaran online sangat mempengaruhi minat belajar siswa, siswa merasa jenuh karena tidak bertatap muka dengan teman dan gurunya, dan juga pembelajaran yang tidak menarik sehingga siswa mudah bosan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ialah lokasi penelitian dan judul penelitian.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar SD dan SMP di Kota Ternate sebagai upaya pengembangan daerah yang seharusnya menggambarkan bagaimana proses

pelaksanaan pembelajaran Daring menjadi efektif. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbeda dengan penelitian Wahyu Aji Fatma Dewi maupun Ria Yunitasari, Umi Hanifah. Selain itu pengukuran/indikator, yaitu berdasarkan pendapat dari Edward III (Yadav, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaplikasian kebijakan Belajar Dalam Jaringan (DARING) sebagaimana edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan didalam situasi pandemi covid-19 yang belum usai.

II. METODE

Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mengeksplor suatu fenomena yang tidak bisa dikuantifikasikan dengan bersifat deskriptif seperti proses pada suatu langkah kerja, formula sebuah resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang memiliki keberagaman, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar, gaya, tata cara sebuah budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya. (Komarian dan Satori, 2010). Dan kemudian menganalisis data melalui pendekatan induktif, dimana pada proses dan maknanya lebih menonjol. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Ternate, dan Orang tua Siswa SD Negeri 50 Kota Ternate. Terkait analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Edward III (Edward III, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis Menganalisis Kebijakan Pembelajaran Daring Bagi Siswa SD dan SMP sebagai solusi pendidikan selama Pandemi Covid-19 di Kota Ternate dengan menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur menggunakan 4 dimensi yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, yaitu: 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut. 3) Dimensi konsistensi (consistency)

diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga meringankan pelaksana kebijakan.

Dalam sebuah implementasi salah satu hal penting adalah isi dari kebijakan ataupun aturan itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan menjadi implementasi yang gagal jika tujuan dari aturan atau kebijakan tersebut masih samar atau tidak jelas arah kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila implementor atau pelaksana kebijakan paham dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah diputuskan, yang mana maksud dan tujuan dari arah kebijakan tersebut bisa dilihat dari komunikasi terkait isi kebijakan itu sendiri. Adapun tiga hal yang harus diperhatikan terkait pelaksanaan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Bisa dijelaskan sebagai berikut:

1) Transmisi

Transmisi merupakan semua hal yang menyangkut dengan penyaluran komunikasi, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka isi dan tujuan dari kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate telah dikomunikasikan dengan melakukan sosialisasi terkait mekanisme pembelajaran daring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate kepada seluruh guru, siswa dan juga orang tuanya.

Dengan dilakukannya sosialisasi kepada guru terkait mekanisme pembelajaran daring tersebut, maka pihak sekolah dapat mempersiapkan metode pembelajaran kepada siswa terkait pembelajaran secara daring. Hal yang sama terkait informasi pembelajaran secara daring ini juga mendapat respon baik dari guru. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu guru di SMP Negeri 5 Kota Ternate, bahwa: “Betul bahwa, kita ini seluruh guru yang ada di Kota Ternate ini, dipersiapkan dengan mengikuti diklat yang dilakukan oleh Dikjar Kota Ternate.

Sosialisasi juga dilakukan kepada orang tua siswa terkait bagaimana mekanisme pembelajaran secara daring ini dilaksanakan nanti dirumah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu orang tua siswa SMP Negeri 5 Kota Ternate, yakni Bapak Angky Nero bahwa: “Saya diberitahu oleh wali kelas anak saya melalui *whatsapp group* orang tua, kalau belajar daring ini nanti dilaksanakan dirumah dan menggunakan hp atau laptop (07 Januari 2022, Kel. Tafure Kota Ternate)”

2) Kejelasan Komunikasi

Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus disalurkan dengan jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka dari itu sosialisasi pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate harus dilakukan dengan persiapan yang sudah matang dan dapat dengan mudah dipahami. Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate kepada kepala sekolah dan juga guru yaitu dilaksanakannya pelatihan guna mempersiapkan SDM pengajar yang kompeten nantinya, seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Ternate, bahwa terkait komunikasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah berjalan dengan baik dan jelas, dikarenakan adanya pelatihan kepada guru sehingga SDM tenaga pengajar dapat disiapkan dengan baik.

3) Konsistensi

Komunikasi yang baik harus memastikan seluruh satuan pendidik yang terlibat sudah memahami dengan jelas terkait segala hal tentang pembelajaran

secara daring, dan merespons kebijakan tersebut dengan baik. Konsistensi penyampaian pesan dari pejabat tertinggi hingga terendah, harus dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan menghambat keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Hasil penelitian yang di dapat pada penelitian ini, telah terdapat konsistensi dari kepala dinas hingga para kepala sekolah dari SD hingga SMP yang ada di Kota Ternate, dan juga disampaikan kepada para siswa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala mengenai proses pembelajaran daring, dikarenakan kemampuan guru yang masih dibawah standar terkait pemahaman pembelajaran secara daring ini. Akan tetapi, Dinas Pendidikan Kota Ternate juga melakukan pelatihan kepada guru agar dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap pembelajaran secara daring ini.

3.2 Sumber Daya

Sumber Daya Menurut Edward III dalam Widodo bahwa sumberdaya tersebut meliputi: 1) Sumberdaya Manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa "probably the most essential resources in implementing policy is staff". 2) Sumberdaya Anggaran Menurut Edward III dalam Widodo menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 3) Sumberdaya Peralatan menurut Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. 4) Sumberdaya Kewenangan dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Tersedianya sumber daya adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Menurut George Edward III, jika komunikasi telah dilakukan dengan jelas dan konsisten, akan tetapi jika pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam implementasi tersebut, maka implementasi dari kebijakan tersebut akan mengalami hambatan ketika dilaksanakan. Jika, sebuah implementasi kebijakan berjalan dengan efektif harus dibutuhkan empat komponen dari sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan sumber daya waktu. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah bagian penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang harus dikelola dengan baik. Hal ini karena, manusia merupakan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Pelaksana kebijakan ini yang menentukan keberhasilan dan kegagalan ketika terlibat langsung dalam sebuah kebijakan pada implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate, maka dibutuhkan adanya para pelaksana kebijakan yang berkompentensi dalam melaksanakan tugas dan dapat bekerjasama dengan baik agar dapat mencapai

tujuan yang telah disepakati bersama, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, bahwa: “Kami secara keseluruhan dari semua bidang yang ada di Dikjar berkomitmen dan selalu menyiapkan segala bentuk kesiapan mulai SDM guru hingga siswa agar mampu menjalankan kebijakan ini (24 Januari 2022, Dinas Pendidikan Kota Ternate)”.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan para pelaksana kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate ini, yang mana dari kepala dinas pendidikan beserta jajarannya. Para pelaksana kebijakan dalam melakukan tugasnya untuk keberhasilan kebijakan pembelajaran secara daring pada tingkat sekolah dasar (SD) dibidangi oleh kepala bidang pembinaan SD sebagai penanggungjawab, dan untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dibidangi oleh kepala bidang pembinaan SMP.

Kemudian, pelaksanaan pembelajaran secara daring di sekolah dilakukan oleh semua guru, yang telah dipersiapkan sistem kurikulumnya sampai dengan desain pembelajaran secara daring, diharapkan kepada semua siswa yang menjadi sasaran untuk keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat, mampu menjalankan mekanisme pembelajaran secara daring tersebut.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran dibutuhkan, untuk bantuan terkait pelaksanaan kegiatan dalam implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate, dan juga untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate secara keseluruhan mendapat bantuan anggaran dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan juga bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), dan juga terdapat bantuan langsung dari Kemendikbud melalui Telkomsel terkait kuota internet gratis kepada guru maupun siswa demi kelancaran pembelajaran secara daring. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bahwa pelaksanaan kebijakan pembelajaran secara daring ini juga mendapat bantuan dari pusat maupun daerah, adapun bantuan tersebut bersumber dari Dana BOS dan juga BOS Daerah, kemudian bantuan kuota gratis dari Telkomsel yang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud guna menunjang keberlangsungan pembelajaran daring ini.

3) Sumber Daya Peralatan

Adanya sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana, merupakan salah satu hal yang menjadi faktor pendukung dari keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana berkedudukan sebagai alat bantu untuk pelaksana kebijakan dalam melakukan tugasnya. Adapun sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, ialah pada beberapa sekolah baik SD maupun SMP di Kota Ternate berupa lab komputer dan jaringan internet seperti Wi-Fi sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Ternate. Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan, dalam hal ini kebijakan pembelajaran secara daring telah tertulis dalam Surat Pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Ternate No: 421/331/2021 Tahun 2021. Dalam surat

tersebut ditetapkan bahwa, pelaksanaan belajar mengajar di sekolah dilakukan secara DARING (dalam jaringan) dan LURING (luar jaringan).

Kemudian, kepala sekolah juga dapat memaksimalkan peran guru baik dalam tugas pembelajaran daring maupun luring tersebut. Sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut kepala sekolah harus dapat memaksimalkan kemampuan gurunya dalam menjalankan sistem pembelajaran secara daring tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate bahwa: “Kita mengacu kepada peraturan dari pusat yaitu SKB 4 Menteri, dan juga kemarin sempat ada peningkatan COVID-19 di kalangan pelajar sehingga kami mengeluarkan kebijakan tersebut (24 Januari 2022, Dinas Pendidikan Kota Ternate)”.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan tugas terhadap pelaksana khususnya para kepala sekolah di Kota Ternate sudah jelas, dan telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diatur dalam Surat Pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Ternate No: 421/331/2021 Tahun 2021 terhadap pelaksana kebijakan.

3.3 Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”²⁰. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan seperti kesediaan, antusias, dukungan, komitmen, dan kecakapan pelaksana kebijakan dalam melakukan tugasnya. Menurut George Edward III, disposisi menjadi faktor keberhasilan dari kebijakan, karena dapat mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan karena disposisi didasari dari sikap pelaksana, dan juga komitmen untuk menjalankan kebijakan. Maka, keberhasilan dari implementasi kebijakan akan semakin jelas.

1) Pengangkatan Birokrasi dan Sikap Pelaksana

Dilihat dari aspek pengangkatan birokrasi dan sikap pelaksana, dapat dilihat dari kinerja dan respon pelaksana terhadap suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan mekanisme pembelajaran secara daring yang dilihat ialah respon dan sikap dari pelaksana kebijakan, yaitu seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan Kota Ternate, hingga seluruh guru dari SD hingga SMP yang ada di Kota Ternate.

Sikap pelaksana kebijakan baik dari dinas pendidikan hingga pihak sekolah mendukung penuh kebijakan pembelajaran secara daring ini, dikarenakan

pembelajaran secara daring merupakan hal yang terpenting untuk dapat memberikan pendidikan yang maksimal kepada siswa.

2) Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Dalam hal ini, pihak sekolah selalu mengontrol siswa dengan cara mengkomunikasikan dengan orang tua yang selalu mendampingi anaknya melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Seperti yang dikatakan oleh Kepsek SMP Negeri 5 Kota Ternate, bahwa: “Kami dari pihak sekolah selalu mengkomunikasikan dengan orang tua siswa yang mendampingi mereka ketika belajar daring (07 Januari 2022, SMP Negeri 5 Kota Ternate)”.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah yakni melalui guru, selalu mengontrol siswa yang belajar daring dari rumah dengan melakukan komunikasi dengan orang tua yang mendampingi anaknya dalam melakukan pembelajaran daring.

3.4 Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno “Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Struktur birokrasi berkaitan erat dengan prosedur, sistem kerja, pembagian tugas, wewenang serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. George Edward III dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat dua karakteristik dalam birokrasi yaitu, standar operasional prosedur dan fragmentasi. Dari hasil penelitian bahwa, belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait pembelajaran secara daring di dinas pendidikan maupun di sekolah.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena, dilihat dari belum tercapainya faktor keberhasilan dari kebijakan. Faktor penghambat implementasi kebijakan pembelajaran secara daring bagi pelajar SD dan SMP di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara adalah, kurangnya pemahaman guru terhadap mekanisme pembelajaran secara daring, seperti penggunaan teknologi dalam proses pembuatan desain belajar kepada siswa, fasilitas pembelajaran yang masih kurang, seperti kendala pada jaringan internet yaitu tidak memiliki kuota internet, dan kurangnya perangkat teknologi seperti laptop ataupun komputer di sekolah, Kurangnya kontrol serta pengawasan terhadap proses pembelajaran siswa dirumah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan Pembelajaran daring untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, I. "Politik Dan Kebijakan Publik." Bandung: AIPI, 2006.
- Bungin, B. "Analisa Data Penelitian Kualitatif." Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Deddy, M. "Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan." Bandung: Alfabeta, 2015.
- Islamy, M.I. "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara." Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Moleong. L.J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- . "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- . "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Margono. "Metodologi Penelitian Pendidikan." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Solichin, A.W. "Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara." Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- . "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara." Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sukmadinata. N.S. "Metode Penelitian Pendidikan." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sugiarto, E. "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis." Yogyakarta: Suaka Media, 2017.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2017.
- Waluyo. "Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Widodo, J. "Analisis Kebijakan Publik." Malang: Bayumedia, 2010.
- Winarno, B. "Kebijakan Publik: Teori Dan Proses." Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- . "Teori Dan Proses Kebijakan Publik." Yogyakarta: Media Presindo, 2005.

Jurnal

- Dewi, W.A.F. "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 2, no. 1 (April 29, 2020): 55–61.
- Elliot, Masie, Cisco, Comellia. "TechLearn: E-Learning Brief." Prentice-Hall. Inc, 2000.
- Handarini, Oktafia .I., and Wulandari. S.S. "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH)." *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)* 8, no. 3 (2020): 465–503.
- Kartika. "Model Pembelajaran Daring." *Journal of Early Childhood* (2018): 27.
- Munawar, Muniroh, Prasetyo. A., and Pusari. R.W. "Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Melalui Pendekatan In House Training Berbasis Kearifan Budaya Lokal." *Jurnal Penelitian PAUDIA* 2, no. 1 (2013): 1–13.
- Pane, Aprida, and Dasopang. M.D. "Belajar Dan Pembelajaran." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2017): 333.
- Rustaman, Haris. A. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Daring, Video Conference Dan Sosial Media Pada Mata Kuliah Komputer Grafis 1 Di Masa Pandemi Covid-19." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 3 (July 25, 2020).
- Santosa, Pangondian, dkk. "Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Daring Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)* (2019).
- Yunitasari, Ria, and Hanifah. U. "Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa COVID 19." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2020): 232–243.

Skripsi

- Karimatunnissa, A. "Analisis Strategi Pembelajaran Daring Pada Guru Era Pandemi Covid-19." *Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang* 19 (2020).

Peraturan

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)

Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Ternate No: 421/331/2021 tahun 2021



Website

COVID-19, Satuan Tugas Penanganan. "Covid19.Go.Id." *Data Sebaran*. Last modified 2021. Accessed September 4, 2021. <https://covid19.go.id/>.

Laporan, Semester Tahun, Elieser Tarigan, S Si, M Eng, D Ph, and I Identitas. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2012. Accessed August 26, 2021. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/mendikbud-dan-mendagri-gelar-rakor-dengan-kepala-daerah-bahas-pembelajaran-di-masa-pandemi>.

Mushlihin. "Memahami Definisi Operasional Dalam Penelitian." Last modified 2013. Accessed September 20, 2021. <http://www.muhsin.com/2013/11/penelitian/memahami-definisioperasional-dalam-penelitian.php>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia-?page=all>

<http://www.wantiknas.go.id/id/berita/empat-kelebihan-dan-kekurangan-dalam-menerapkan-e-learning>

